

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sejarah Indonesia terbagi ke dalam beberapa periode, salah satunya adalah masa Orde Baru (1966-1998). Periode ini berawal dari pergulatan politik antara Soekarno, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) membawa perubahan yang besar terhadap politik di Indonesia sekitar tahun 1965-1966. Situasi yang berkejolak ini mencapai puncaknya ketika terjadi tragedi Gerakan 30 September (G30S), yang secara tidak langsung telah menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik dalam waktu cepat sedangkan kondisi pemerintahan dalam keadaan darurat. Sehingga, hal ini berdampak terhadap ketidakstabilan dan keamanan negara. Krisis ini kemudian mengantarkan Soeharto menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Kekuasaan Soeharto di Indonesia dimulai ketika ia diberikan kuasa untuk menangani krisis nasional melalui surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966, yang telah menjadi pembuka jalan bagi Soeharto untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia sebagai presiden.¹ Pada perkembangannya, Supersemar

¹ Sulastomo, *Hari-hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), Hal.164

ini kemudian dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui ketetapan No.IX/MPRS/1966.

Setelah berhasil menduduki posisi sebagai presiden, Soeharto mengarahkan tujuan pembangunannya ke arah stabilitas politik sebagai syarat bagi kinerja perekonomian,² dimana pemerintahan Soeharto memposisikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai prioritas utama terselenggaranya pembangunan ekonomi, untuk mencapai terselenggaranya pembangunan tersebut maka diperlukan sebuah stabilitas politik. Stabilitas politik yang diciptakan oleh pemerintahan Orde baru membuat Soeharto berhasil mempertahankan jabatan sebagai presiden hingga lebih dari 30 tahun.

Stabilitas tersebut ditopang oleh pondasi yang sangat kuat, yang diciptakan sejak periode awal Soeharto mulai berkuasa. Dalam mewujudkan stabilitas tersebut Soeharto tidak melakukan sendirian, banyak tokoh di belakangnya berperan dalam membangun pemerintahannya. Salah satu tokoh yang ikut berperan dalam pemerintahan Soeharto adalah Ali Moertopo, seorang yang bisa dikatakan sebagai seorang pemikir dan penindak dalam menyusun landasan Orde Baru atau Arsiteknya Orde Baru.

Ali Moertopo merupakan seorang Jendral Angkatan Darat yang memiliki pemikiran strategi politik, strategi pertahanan serta strategi

² R.E. Elson, *Suharto, Sebuah Biografi Politik* (Jakarta: Minda, 2005) Hal. 331

ekonomi yang bisa dapat dikatakan cemerlang. Ia lahir pada 23 September 1924 di Blora, Jawa Tengah. Ali Moertopo merupakan anak ketiga dari Sembilan saudara, meski demikian ia termasuk anak sulung laki-laki dari sepasang suami istri yang bernama Soetikno Kartoprawiro dan Soekati.³ *Mangkyo*, itulah nama panggilan Ali Moertopo di keluarganya. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan religius. Masa remaja yang dilalui Ali Moertopo sangat kontras dengan perkembangan karirnya di kemudian hari, bahkan bertolak belakang, sebab di masa remajanya, Ali Moertopo tidak pernah memiliki pikiran untuk terlibat dalam kehidupan militer dan politik. Namun sejarah mengenal Ali Moertopo sebagai orang yang ahli dalam Militer, Intelijen dan Politik.

Kepandaiannya dalam bidang militer dimulai sejak Ali Moertopo berada di Kodam Diponegoro tahun 1945 sampai akhirnya menjadi Perwira Tinggi (Pati), Letnan Jenderal di tahun 1974. Jejak Ali Moertopo ada di mana-mana. Di masa Orde Baru, Ali Moertopo menorehkan prestasi yang melambungkan namanya yaitu saat ia berhasil menyelesaikan memorandum atau jajak pendapat di Irian Barat, menyelesaikan masalah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, dan kesuksesannya dalam membawa Golkar sebagai pemenang dalam pemilu 1971. Keberhasilan inilah yang akhirnya membawa Ali Moertopo menjadi orang kepercayaan Soeharto untuk ikut serta dalam menjalani pemerintahan.

³ M. Aref Rahmat, *Ali Moertopo dan Dunia Intelijen Indonesia* (Yogyakarta: Narasi, 2011), Hal, 20.

Pada tahun 1966, Ali Moertopo diangkat menjadi Staf Pribadi (Spri) Presiden walaupun berselang dua tahun (1968) Spri dibubarkan, kendati demikian Ali Moertopo tetap dipercayakan menjadi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden dalam bidang politik. Sebelum menduduki jabatan di Spri dan Aspri, Ali Moertopo telah berkiprah dalam suatu badan yang bernama Operasi Khusus (Opsus), yang merupakan badan operasi intelijen yang bertugas langsung turun ke lapangan bersama Benny Moerdani dan Sugeng Djarot untuk mengakhiri konfrontasi dan melaksanakan proses normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia.⁴ Kepercayaan Soeharto untuk memberikan perintah kepada Ali Moertopo dalam menangani permasalahan tersebut dikarenakan Ali Moertopo merupakan seorang perwira yang memiliki latar belakang yang luas dalam tugas intelijen, termasuk tugas-tugas politik yang bersifat terobosan⁵ dan menurut Ken Conboy dalam *Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia* salah satu alasan Soeharto menaruh kepercayaan kepada Ali Moertopo dikarenakan reputasi Ali Moertopo sebagai perwira militer yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah secara efisien.⁶ Opsus kemudian berkembang, yang semula dibentuk sebagai operasi intelijen untuk proses normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, menjadi sebuah

⁴ Tim CSIS, *Ali Moertopo 1924-1984* (Jakarta: CSIS, 2004), Hal. 16-17

⁵Hidayat Mukmin, *TNI dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), Hal.116

⁶Ken Conboy, *Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia* (Tangerang: Pustaka Primatama, 2007) Hal.42

badan yang dicap dalam seluruh kegiatan operasi intelijen baik dalam bidang militer maupun di bidang politik.

Setelah malapetaka Peristiwa Malari 15 Januari 1974, jabatan Aspri ditiadakan, hal ini tidak membuat Ali Moertopo kehilangan posisi dalam kedudukannya. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Ali Moertopo kembali dipercaya untuk mengatasi permasalahan Timor Timur. Mandat tersebut membuat Ali Moertopo memiliki peran yang aktif sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan dengan pihak Portugal untuk membicarakan masa depan Timor Timur.

Setelah Pemilu 1977, Ali Moertopo mendapatkan jabatan sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan III, sebuah jabatan yang bertolak belakang dengan bidang yang ia sukai yaitu Intelijen dan Politik. Selama menjadi Menteri Penerangan (1978-1983) Ali Moertopo mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu mengenai pembekuan atau bahkan pencabutan Surat Izin terbit (SIT) media massa. Dimana pemerintah melalui Departemen Penerangan memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut penerbitan media yang dinilai “bandel” atau yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

Salah satu media massa yang terkena imbas dari kebijakan yang dikeluarkannya yaitu *Tempo* pada 12 April 1982, ia mengeluarkan keputusan yang isinya membekukan SIT *Tempo* Karena dianggap melanggar kode etik pers yang bebas dan bertanggung jawab. Tidak hanya

media cetak yang dikendalikan dengan ketat demi menjaga stabilitas nasional. Pada tahun 1980, Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang merupakan stasiun televisi satu-satunya yang dimiliki Indonesia diubah statusnya oleh Ali Moertopo dari yayasan TVRI menjadi Lembaga Direktorat TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan RI.⁷ Dengan demikian media massa baik cetak maupun elektronik harus senantiasa mendukung program-program pemerintah dan melayani ambisi politik Orde Baru sehingga semua aspek media berada dibawah pengawasan yang ketat dan kuasa baik ijin terbit dan produksi siaran dari pemerintah Orde Baru.⁸

Ali Moertopo memiliki peranan penting selama Orde Baru hal ini dapat dilihat dari karir atau jabatan-jabatan yang ia duduki semasa hidupnya. Salah satu peranan penting yang dimainkannya yaitu pemikirannya bersama lembaga Studi yang didirikan bersama Soedjono Hoemardani pada tahun 1971. Lembaga studi ini bernama *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan atau *Think tank* melalui Ali Moertopo, ikut memberikan masukan strategi dan kebijakan kepada Soeharto.⁹ Salah satu ide yang lahir dari pemikirannya yaitu mengenai Strategi

⁷ Ishadi, *TVRI Mau Ke Mana?*, Kompas, 24 Agustus 2012

⁸ Effendi Gazali, "Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 8 No. 1, 53-74 (Juli 2004), hal. 60-61

⁹ Tempo, *Rahasia-rahasia Ali Moertopo* (Jakarta: KPG, 2014), Hal.2

Pembangunan melalui *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun* dan strategi politik atau strategi pertahanan nasional.

Dasar-dasar pemikiran tentang *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun*, buku yang ditulisnya dan diterbitkan pada tahun 1972 yang kemudian pemikiran tersebut dipakai oleh pemerintah sebagai kebijakan dan dijadikan *blueprint* sebagai model pembangunan jangka panjang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa pemerintahan Orde Baru. Akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun ini merupakan uraian dari pemikiran ekonomi Ali Moertopo yang merupakan gagasannya tentang strategi pembangunan ekonomi. Akselerasi Modernisasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional Indonesia sampai sekurang-kurangnya tiga kali lipat dan menaikkan pendapatan nasional Indonesia rata-rata 8% pertahun. Untuk menunjang akselerasi pembangunan nasional Indonesia dibutuhkan: pertama, terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; kedua, adanya partisipasi sosial yang sadar dan meluas; dan ketiga, terciptanya kontinuitas nasional.¹⁰ Strategi Akselerasi dimaksudkan untuk menciptakan sistem stabilitas ekonomi dan sistem ekonomi terpusat dikembangkan dengan tujuan pertumbuhan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Gagasan Ali Moertopo lahir atas ideologinya yang menekankan pada “Politik sebagai Panglima”.

¹⁰ Ali Moertopo, *Dasar-dasar pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun* (Jakarta: CSIS, 1972), hal. 22-27

Sebelumnya sudah terdapat beberapa tulisan tentang Ali Moertopo. Seperti, *Skripsi* karya Sutarni Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2006 yang berjudul *Rivalitas Ali Murtopo dan Soemitro: Gerakan Mahasiswa di Bawah Sepatu Laras pada peristiwa Januari 1974 di Jakarta* tulisan tersebut berfokus pada perpecahan internal elit militer Angkatan Darat yaitu Ali Moertopo dan Soemitro dalam perpolitikan di Indonesia tahun 1971 sampai 1974 dan hubungan mereka dalam gerakan mahasiswa pada peristiwa Malari tahun 1974. Selain itu ada *Skripsi* karya Dwi Setiyono Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014 yang berjudul *Peranan Ali Moertopo Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik Pada Masa Pemerintahan Soeharto (1966-1984)*, tulisan tersebut hanya difokuskan kepada peranan Ali Moertopo dalam mewujudkan stabilitas politik pada masa pemerintahan Orde Baru. *Skripsi* selanjutnya yaitu karya Faizal Akbar S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada yang berjudul *Kekuasaan di Balik Orde Baru Titik Dua Pengaruh Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Periode 1971-1988*, penelitian tersebut menjelaskan mengenai peranan politik CSIS dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan masa Orde Baru periode 1971-1988.

Berdasarkan pemaparan diatas dan beberapa hasil penelitian yang sudah ada, penulis tertarik untuk meneliti mengenai seorang Ali Moertopo sebagai seorang pemikir dalam strategi pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana, serta sejauh

mana seorang Ali Moertopo yang berlatar belakang intelijen militer bisa melahirkan pemikiran mengenai “Dasar-dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun” yang merupakan pemikiran mengenai pembangunan ekonomi. Pemikirannya ini memiliki tujuan dan visi untuk masa depan Indonesia. Se jauh pengetahuan penulis, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai sosok Ali Martopo sebagai pemikir dalam strategi pembangunan pemerintahan Orde Baru. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mencari tahu sosok Ali Moertopo sebagai seorang pemikir. Sehingga peneliti menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul *Pemikiran Ali Moertopo dalam Strategi Pembangunan Orde Baru (1971-1984)* kedalam sebuah karya tulis skripsi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan, Pembatasan perlu dilakukan agar penelitian dapat lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar pada permasalahan-permasalahan lainnya. berdasarkan uraian diatas penelitian ini berfokus pada Ali Moertopo sebagai seorang pemikir dan penindak pada masa pemerintahan Orde Baru periode 1971 dan 1984. Pertimbangannya pada tahun 1971, Ali Moertopo dan rekannya Soedjono Hoemardani mendirikan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS). Berdirinya CSIS merupakan wadah bagi

Ali untuk menyusun Ide-ide pemikirannya antara lain mengenai Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun. Penulis membatasi penelitian sampai dengan tahun 1984, pertimbangannya karna pada tahun tersebut Ali Moertopo meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang sudah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Ali Moertopo memiliki pemikiran dalam Strategi Pembangunan (1971-1984)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan perjalanan hidup Ali Moertopo, dan memaparkan pemikiran Ali Moertopo dalam strategi pembangunan Orde Baru (1971-1984).

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritik meskipun tidak melahirkan teori baru, tetapi diharapkan penelitian ini dapat memperkaya tema - tema kajian Sejarah Indonesia khususnya pada masa Orde Baru.

- b) Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan kajian dan bahan referensi dalam kajian Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru.

D. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Ilmu Sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya mempunyai unsur yang merupakan alat untuk mengorganisasi seluruh tubuh pengetahuannya serta menstrukturasi pikiran, yaitu metode sejarah.¹¹ Metode sejarah, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh, baik secara lisan maupun tulisan dan merekonstruksikan secara imajinatif berdasarkan data yang ada.¹²

Sejarah terkait pada penalaran yang berdasar pada fakta (kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sejarah secara objektif. Metode sejarah ini mengkaji dan menganalisis permasalahan dengan lebih mengutamakan perspektif masa lampau dari objek yang diteliti.¹³ Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan – tahapan penulisan sesuai yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk, sebagai berikut::

¹¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal. ix

¹² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 39

¹³ *Ibid.*, hal. 19

a. Heuristik

Heuristik dapat diartikan sebagai pencarian atau pengumpulan sumber – sumber sejarah. Penelitian ini berupaya mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Ali Moertopo dari tahun 1971 hingga tahun 1984. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data atau kepustakaan sejarah yang relevan dengan objek yang diteliti. Sumber yang dapat digunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (di sini selanjutnya secara singkat disebut saksi pandangan – mata).¹⁴ Sumber primer ini terdiri dari sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari pelaku peristiwa yang diceritakan, sedangkan, sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh dari dokumen, naskah, arsip yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 43

saksi pandangan – mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.¹⁵

Dalam hal ini penulis telah mendapatkan data primer dan sekunder berupa buku-buku, koran, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan tema penulisan yang terdapat di beberapa perpustakaan seperti, Perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia..

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah mendapatkan sumber, tahap berikutnya ialah Verifikasi atau kritik sejarah atau keabsahan sumber guna mengetahui apakah data akurat atau tidak baik segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi terdiri atas ada dua macam yaitu melakukan kritik ekstern (*otentisitas*) dan kritik intern (*kredibilitas*).¹⁶ tahap verifikasi atau kritik digunakan untuk memperoleh keabsahan sumber, dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (*otentisitas*) yang dilakukan melalui kritik eksternal dan kesahihan sumber (*kredibilitas*) yang ditelusuri melalui kritik internal.¹⁷ Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber yang meliputi

¹⁵ *Ibid.*, hal. 39

¹⁶ *Ibid.*, hal. 95 - 112

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 68

penelitian terhadap sumber, tanggal, waktu dan siapa pembuat atau pengarangnya. Sedangkan, kritik intern, bertujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber dan dokumen sejarah yang meliputi kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah. Semua sumber dipilih melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

Dalam tahap kritik ini, peneliti melakukan analisa data melalui metode sejarah dengan melakukan seleksi terhadap fakta yang ada, yang dianggap memiliki keterhubungan dengan Ali Moertopo. Ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang akurat. .

c. Interpretasi

Interpretasi atau disebut penafsiran, setelah menyeleksi sejauh mana kebenaran, keabsahan suatu data. Kemudian dilakukan interpretasi yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap objektif. Interpretasi ini ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Interpretasi analisis berarti menguraikan sedangkan, interpretasi sintesis berarti menyatukan.¹⁸ Dalam tahap ini penulis melakukan analisis peristiwa sejarah sesuai dengan data yang telah terkumpul dengan tujuan agar dapat menguasai bahasan atau masalah yang dibahas. Selanjutnya penulis mengadakan sintesis

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 78 - 79

sebagai penyatuan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penulisan. Dimaksudkan untuk mencari runtutan peristiwa sejarah sehingga menjadikan rangkaian cerita sejarah yang tidak terputus.

d. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi dapat diartikan rekonstruksi yang imajinasi daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh berbagai proses.¹⁹ Historiografi juga sering disebut penulisan sejarah. Penelitian ini disajikan menggunakan dekriptif naratif yaitu penulisan sejarah yang disusun berdasarkan kronologis peristiwa dengan memperhatikan sebab – akibat (kausasi) pada peristiwa.

2. Sumber Penelitian

Dalam penulisan sejarah Indonesia periode waktu penelitian dikategorikan ke dalam kelompok kontemporer. Periode yang diteliti tidak terlalu jauh dengan waktu penelitian dilakukan. Ini memungkinkan tersedianya sumber-sumber beragam yang dapat dijangkau baik sumber primer dan sumber sekunder. Dalam rangka penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sesuai dengan kaidah penulisan sejarah yang ilmiah. Sumber primer merupakan peristiwa yang disampaikan langsung oleh saksi

¹⁹ Louis Gottschalk, *Op.Cit.*, hal. 39

mata atau pelaku sejarah atau dokumen resmi seperti catatan rapat.²⁰ Sedangkan, sumber sekunder merupakan peristiwa yang disampaikan bukan oleh saksi mata dan hasil laporan seperti surat kabar.²¹ Adapun sumber-sumber yang akan digunakan antara lain: sumber primer dalam bentuk sumber tertulis, maka peneliti menggunakan buku yang ditulis langsung oleh Ali Moertopo seperti *Strategi Pembangunan Nasional* yang diterbitkan tahun 1981 oleh CSIS.

Mengenai sumber sezaman, peneliti menggunakan Surat Kabar seperti *Majalah Prisma, Harian Kompas, Tempo, dan Pikiran Rakyat*. Sumber sekunder yang digunakan penulis berupa buku yang secara umum maupun spesifik yang berhubungan dengan tema penelitian ini, baik buku mengenai sejarah Indonesia pada masa Orde Baru maupun mengenai metode penelitian sejarah. Digunakan pula buku – buku yang membahas tentang Ali moertopo seperti *Sekar Semerbak: Kenangan untuk Ali Moertopo* yang ditulis oleh CSIS (1985), buku *Ali Moertopo 1924-1984* yang ditulis oleh Tim CSIS (2004), buku *Mengenang Ali Moertopo dalam Bakti dan Karyanya* karya Jusuf Wanandi dkk (2004) dan buku *Ali Moertopo dan Dunia Intelijen Indonesia* Karya M. Ared Rahmat (2011). Sumber bahan yang didapatkan oleh peneliti dari beberapa tempat seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan CSIS,

²⁰Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), hal.xv

²¹ Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hal. 100

Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri
Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, dan Ruang Baca Prodi
Pendidikan Sejarah UNJ

